



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong





KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penyusunan RKT didasarkan kepada Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong Tahun 2020 – 2025 belum tersusunnya RAP Tahun 2020 – 2025 dari Ditjen P2P. Rencana Kerja Tahunan yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. Rencana Kerja Tahunan juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di tahun 2025.



Sorong, 04 Januari 2025

Ketua Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Sorong

Agung Budijono, SKM, MKM
NIP. 197201291995031001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Struktur Organisasi	4
3. Sumber Daya Manusia	8
BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN	12
BAB III PENUTUP	20
1. Pemanfaatan RKT.....	20
2. Pemantauan pelaksanaan RKT	20
LAMPIRAN	22





BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun yang akan dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Sorong melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja tahunan satuan kerja BKK Kelas II Sorong merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan yang mencakup periode tahunan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Rencana Kerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan yang di buat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra kementerian pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan. Rencana Aksi Kegiatan 2020 - 2025 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong perlu menyusun RKT Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas II Sorong tahun 2020 – 2025.



2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, Bab IV Pasal 7, BKK dipimpin oleh kepala, dengan susunan organisasi BKK Kelas II Sorong terdiri atas:

a. Subbagian administrasi umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan BKK Kelas II Sorong.

b. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana



dimaksud ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BKK. Ketentuan dalam kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BKK.
- 3) Koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 4) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan/atau subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Menteri.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
 - a) Epidemiolog Kesehatan
 - b) Sanitarian
 - c) Entomolog Kesehatan
 - d) Dokter
 - e) Perawat
 - f) Analis Kesehatan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Non Tenaga Kesehatan
 - a) Analis Pengelola Keuangan APBN
 - b) Arsiparis
 - c) Analis Kepegawaian
 - d) Perencana
 - e) Pranata Komputer
 - f) Pranata Keuangan APBN
- 3) Kelompok Jabatan Pelaksana





Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dikoordinatori oleh Tim Kerja. Susunan Tim Kerja BKK Kelas II Sorong dan uraian tugasnya sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

a) Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

- Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah;
- Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan;
- Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit;
- Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- Penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara;
- Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan;
- Penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.

b) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang

- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan;
- Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut;
- Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada alat angkut;
- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen kekarantinaan kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang;
- Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang;
- Pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko.





- c) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
- Pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan;
 - Penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan;
 - Pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus;
 - Pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus;
 - Pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus.
- d) Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus
- Pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang;
 - Pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis;
 - Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang;
 - Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
 - Penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan;
 - Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi;
 - Pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik;
 - Pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta mass gathering.
- e) Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
- Penyediaan bahan media informasi publik;
 - Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;





- Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan; dan
- Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

c. Instalasi

Mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi BKK Kelas II Sorong. Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang dipimpin oleh kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala BKK. Instalasi di lingkungan BKK Kelas II Sorong terdiri dari:

- 1) Klinik rawat jalan
- 2) Instalasi Laboratorium Lingkungan
- 3) Instalasi Laboratorium Vektor
- 4) Pemeliharaan
- 5) Data dan Informasi

d. Wilayah Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2016/2024 Tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, wilayah kerja BKK Kelas II Sorong terdiri atas:

- 1) Wilayah Kerja Bandar Udara DEO Sorong (Kantor Induk)
- 2) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong
- 3) Wilayah Kerja Pelabuhan Arar
- 4) Wilayah Kerja Pelabuhan Raja Ampat
- 5) Wilayah Kerja Pelabuhan Fak-Fak
- 6) Wilayah Kerja Pelabuhan Kaimana.

Adapun ketentuan dalam wilayah kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah kerja BKK merupakan unit kerja fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKK.
- 2) Wilayah kerja BKK dipimpin oleh kepala dalam jabatan nonstruktural.
- 3) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
- 4) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKK.

3. Sumber Daya Manusia

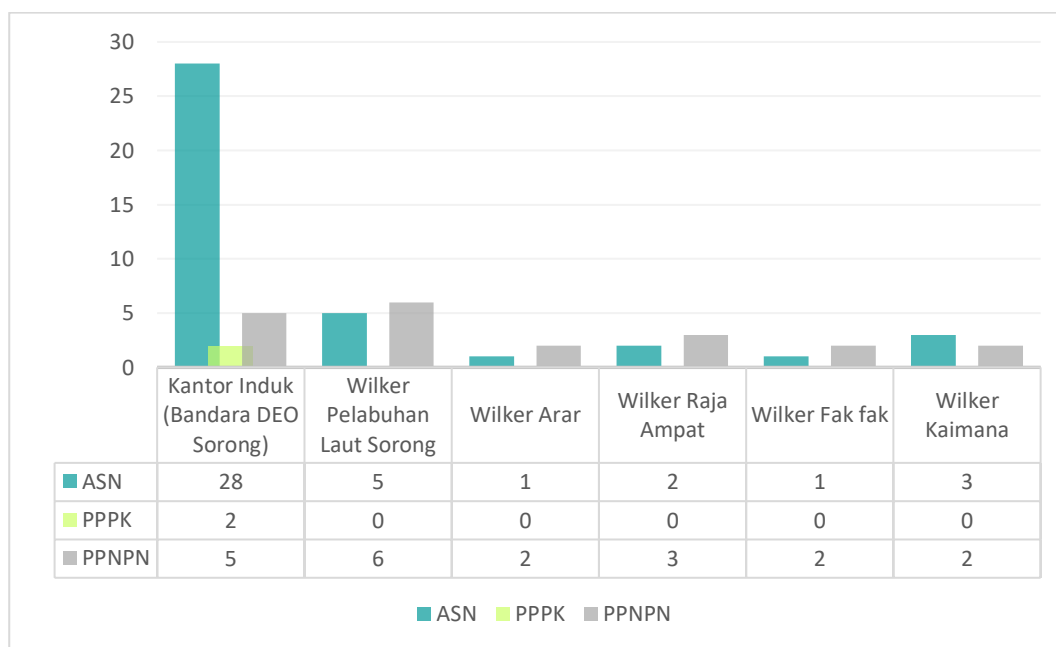
Jumlah Sumber Daya Manusia di BKK Kelas II Sorong adalah 62 orang yang terdiri dari:





- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 40 orang,
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 2 orang, dan
- c. Jumlah tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sejumlah 20 orang.

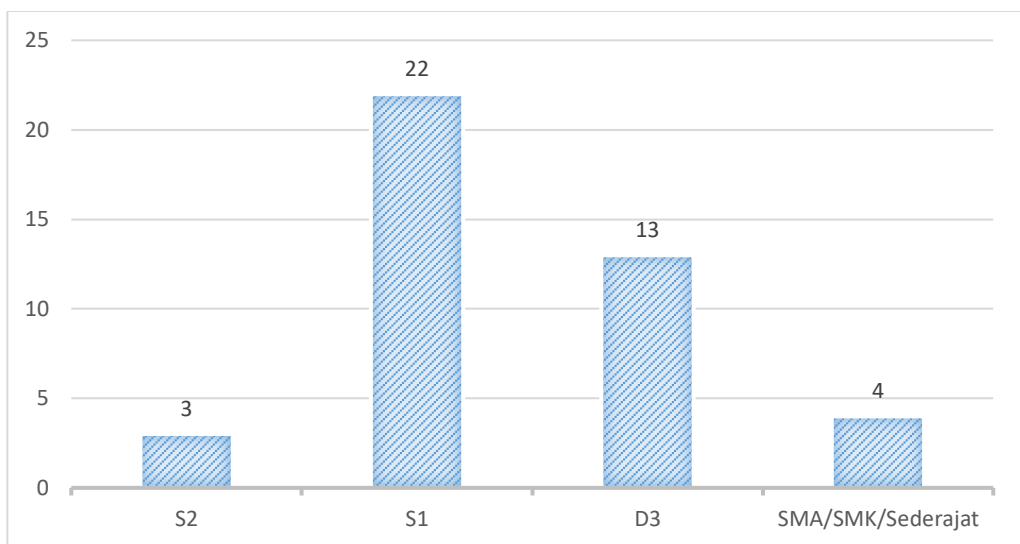
Adapun rincian distribusi per wilayah kerja sebagai berikut:



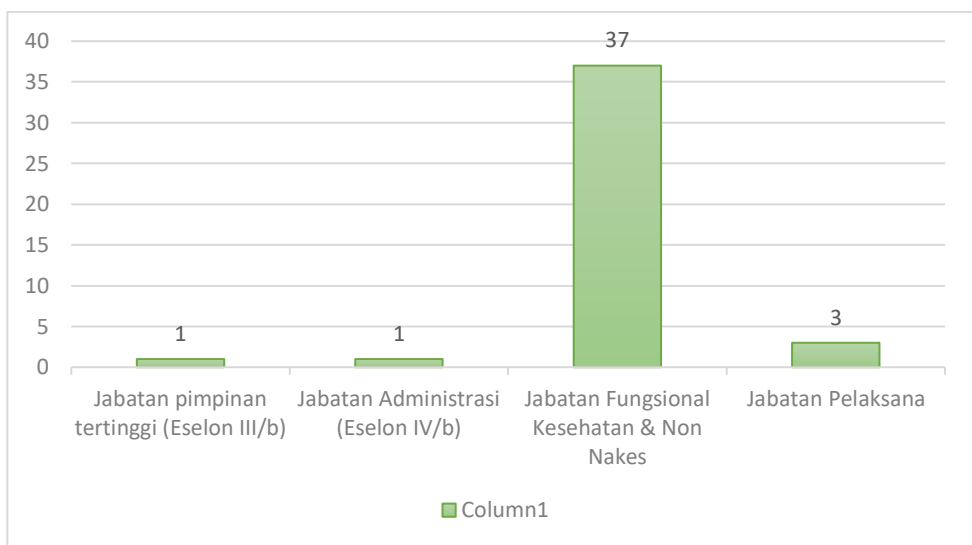
Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Per Wilayah Kerja Tahun 2025

Dari grafik diatas, diketahui penempatan pegawai terbanyak di Kantor Induk berjumlah 35 orang yang dapat di mobilisasi ke pelabuhan sorong, pelabuhan rakyat dan tenaga bantuan di Pos Bandar Udara DEO Sorong. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis jabatan distribusi pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong dapat dilihat pada grafik berikut:





Grafik 1. 2 Distribusi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong



Grafik 1 3 Distribusi PNS Berdasarkan Jabatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong

Tabel 1.1 Rincian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana BKK Kelas II Sorong Tahun 2025

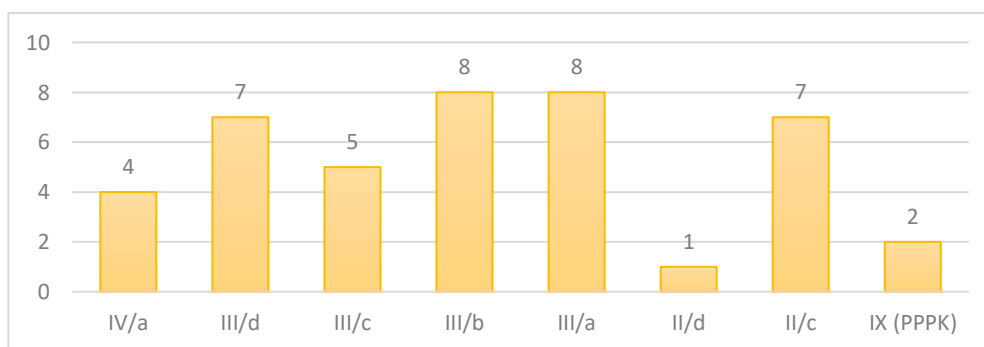
No.	Jabatan Fungsional/Pelaksana	Jumlah
1	Dokter Ahli Madya	1
2	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1
3	Analisis Pengelolaan keuangan ahli muda	1
4	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	1
5	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	3
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	1





7	Dokter Ahli Pertama	2
8	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	3
9	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
10	Sanitarian Lingkungan Ahli Pertama	2
11	Perawat Penyelia	2
12	Arsiparis Ahli Pertama	1
13	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
15	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
16	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
17	Sanitarian Penyelia	2
18	Entomolog Kesehatan Mahir	1
19	Epidemiolog Kesehatan Mahir	2
20	Perawat Mahir	1
21	Entomolog Kesehatan Terampil	1
22	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1
23	Operator Layanan Operasional	2
24	Operator Layanan Kesehatan	1

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKK Kelas II Sorong berdasarkan kelompok golongan:



Grafik 1. 4 Distribusi PNS Berdasarkan Kelompok Golongan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong





BAB II

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi/Satker	:	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong
Program	:	1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit 2. Menurunnya Infeksi penyakit HIV 3. Menurunnya Insiden TBC 4. Meningkatnya kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria 5. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta 6. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular 7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun 8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat 10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium Program Dukungan Manajemen 1. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit





Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
------------------	---	--

Sasaran Kegiatan/KRO/RO dan pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit dipintu masuk negara	0,93	520,653,000
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	494,210,000
		3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,97	1,014,863,000
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai kinerja anggaran	90	9,980,738,000
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	12,698,000
		6. Kinerja implementasi WBK satker	78	3,300,000
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	90,261,000
		8. Persentase realisasi anggaran	96%	9,980,738,000





No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Alokasi 2025
1	Koordinasi	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0,97	367,022,000
	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara			
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	152,034,000
	Pelayanan kesehatan haji	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas			
3	Pelayanan publik lainnya	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	1,019,732,000
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	c. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,97	
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD			
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare			
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD			
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria			
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare			
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS			
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan			





	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria			
4	Sarana bidang kesehatan	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	228,199,000
	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu			
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	95%	378,297,000
	Pelatihan kesehatan			
6	Koordinasi	Nilai Kinerja Anggaran	90	
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program			
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum			
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	a. Nilai kinerja anggaran	90	9,862,362,000
	Layanan BMN	b. Kinerja implementasi WBK satker	78	
	Layanan Hukum			
	Layanan Hubungan Masyarakat			
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
	Layanan Umum			
	Layanan Data dan Informasi			
	Layanan Perkantoran			
8	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	35,360,000
	Layanan Manajemen SDM			
9	Layanan Manajemen Kinerja	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	281,367,000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	b. Presentase realisasi anggaran	96%	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
	Layanan Manajemen Keuangan			
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			





Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Alokasi 2025	Prakiraan Maju	
					Volume	Alokasi 2025
1	Koordinasi	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0,97	367,022,000	4 Kegiatan	124,402,000
	Koordinasi pelayanan kekarantina di Pintu Masuk Negara					
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	152,034,000	392 Orang	83,590,000
	Pelayanan kesehatan haji	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%			
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas					
3	Pelayanan publik lainnya	a. Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	1,019,732,000	704 Layanan	1,153,009,000
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan	b. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%			
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut	c. Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,97			
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria					
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penvakit HIV AIDS					





	Layanan survei faktor risiko penyakit TB					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan					
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria					
4	Sarana bidang kesehatan	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di pintu masuk negara	0,93	228,199,000	6 Paket	500,851,000
	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu					
5	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	95%	378,297,000	50 Orang	209,604,000
	Pelatihan kesehatan					
6	Koordinasi	Nilai Kinerja Anggaran	90			
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program					
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum					
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	a. Nilai kinerja anggaran	90	9,862,362,000	27 Layanan	10,052,980,000
	Layanan BMN	b. Kinerja implementasi WBK satker	78			
	Layanan Hukum					
	Layanan Hubungan Masyarakat					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					
	Layanan Umum					
	Layanan Data dan Informasi					
	Layanan Perkantoran					
8	Layanan Manajemen SDM Internal	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	35,360,000	50 Orang	123,200,000
	Layanan Manajemen SDM					
9	Layanan Manajemen Kinerja	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	281,367,000	29 Dokumen	284,867,000
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	b. Presentase realisasi anggaran	96%			
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi					
	Layanan Manajemen Keuangan					
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					





B. Sumber Pendanaan

No	Rincian Output	ALOKASI (Rp)			Jumlah	Lokasi
		Rupiah Murni	PNBP	PHLN		
1	Koordinasi	94,040,000	272,982,000	-	367,022,000	Sorong
	Koordinasi pelayanan kekarantinaan di Pintu Masuk Negara					
2	Pelayanan publik kepada masyarakat	57,386,000	94,648,000	-	152,034,000	Sorong
	Pelayanan kesehatan haji					
	Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas					
3	Pelayanan publik lainnya	717,696,000	302,036,000	-	1,019,732,000	Sorong
	Layanan pengendalian faktor risiko lingkungan					
	layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit pes					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD					
	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria					
	Layanan survei faktor risiko penyakit diare					
	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS					
	Layanan survei faktor risiko penyakit TB					
	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan					
	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria					
4	Sarana bidang kesehatan	228,199,000		-	228,199,000	Sorong
	Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu					
5	Layanan Manajemen SDM Internal	378,297,000		-	378,297,000	Sorong
	Pelatihan kesehatan					
6	Koordinasi			-		Sorong
	Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program					
	Koordinasi lintas program lintas sektor kepegawaian dan umum					
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,862,362,000		-	9,862,362,000	Sorong
	Layanan BMN					
	Layanan Hukum					





	Layanan Hubungan Masyarakat					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					
	Layanan Umum					
	Layanan Data dan Informasi					
	Layanan Perkantoran					
8	Layanan Manajemen SDM Internal	35,360,000		-	35,360,000	Sorong
	Layanan Manajemen SDM					
9	Layanan Manajemen Kinerja	281,367,000			281,367,000	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran					
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			-		Sorong
	Layanan Manajemen Keuangan					
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan					





BAB III

PENUTUP

1. Pemanfaatan RKT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun (*breakdown* dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis. Rencana Kerja Tahunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong tahun 2025 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan di capai selama tahun 2025, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

2. Pemantauan pelaksanaan RKT

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target. Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (*progress report*) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan, salah satu sistem yang berlaku di BKK Kelas II Sorong yaitu :

- a. E-monev DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dibawah kementerian Keuangan
- b. E-Monev Bappenas.





Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.





TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN	IKK	TARGET	TARGET BULANAN											
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/ PLBDN	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
		a. Persentase orang yang diperiksa sesuai standar		235,000	470,000	705,000	940,000	1,175,000	1,410,000	1,645,000	1,880,000	2,115,000	2,200,000	2,300,000	2,400,000
		b. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar		1,352	2,704	4,056	5,408	6,760	8,112	9,464	10,816	12,168	10,000	11,000	12,000
		c. Persentase barang yang diperiksa sesuai standar		26	52	78	104	130	156	182	208	234	260	286	312
		d. Persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar		183	366	549	732	915	1098	1281	1464	1647	1830	2013	2196
		2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		a. Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan orang		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		b. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada pemeriksaan alat angkut		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		c. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada Pemeriksaan barang		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		d. Persentase Persentase FR yang dikendalikan pada pemeriksaan lingkungan		99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		3. Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan, Bandara/PLBDN	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
		a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1		7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
		c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)		7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
		d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2		7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6
		e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat <2		7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	5
		f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0		7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	5
		g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer <1		7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	5	5





		h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan		55	55	55	55	55	55	55	50	50	50	50	50
		i. Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan		35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Nilai Kinerja Anggaran	90	7	15	22	29	37	44	52	59	67	74	82	90
		5. IKPA	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
		6. Kinerja Implementasi WBK Salkor	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
		7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	74%	83%	91%	96%





Lampiran 2

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

N O	IKK	RO	Targ et	Komponen/Sub	Jan	Feb	Mare t	April	Mei	Juni	Juli	Agus t us	Sept	Okt	Nov	Des	PJ
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyak it di pintu masuk negara	Pelayanan kesehatan haji (HS)	239	Pelayanan kesehatan Embarkasi dan Debarkasi	-	-	-	13,72 5	13,72 5	14,79 0	14,79 0	-	-	-	-	-	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Orang, Kegawatd aruratan, dan
		Pelayanan kesehatan di pelabuhan/ b andara/linta s batas (HS)	290	a. Pelayanan rujukan kurang dari 8 Jam	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	2,125	Tim Kerja Surveilans dan Penindak an Pelangga ran Kekaranti naan Kesehata n;
				b. Pelayanan kesehatan dan Donor Darah dalam Rangka HKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,50 0	-	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Alat
				c. Layanan Kegawatdaruratan				16,25 9									
		Layanan pengendalia n faktor risiko	4	a. Pengawasan sanitasi TTU		3,500											Tim Kerja Pengawa san Faktor





		lingkungan (HS)		b. Pengawasan/Pemeriksaan sampel makanan	763	763	764	763	764	763	764	764	764	764	764	Risiko Kesehatan Lingkungan
				c. Peningkatan Pengetahuan Kader Jumantik dan Pendampingan Kader					22,034							
				d. Pengelolaan Limbah Medis	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	
				e. Pemeriksaan Sampel Makanan dan Air di BTKL Ambon		15,701		15,701		15,701		15,701		15,701		
				f. Survey dan Pengendalian Vektor dan BPP (Umpan Badan)			3,084			3,084			3,084			
		Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit Pes	63	a. Pemetaan	-	19,775		19,775	19,775	19,775	19,775	19,775	19,775	19,775	-	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
				b. Persiapan Bahan dan Alat												
				c. Pemasangan Perangkat												
				d. Identifikasi Tikus dan Pinjal												





		Layanan survei faktor risiko penyakit DBD (HS)	84	Survei faktor risiko penyakit DBD	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	42	Survei faktor risiko penyakit malaria		12,040		12,040		12,040		12,040		12,040		12,040	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan survei faktor risiko penyakit diare (HS)	56	Survei faktor risiko penyakit diare		2,520	2,520		2,520	2,520	2,520	2,520		2,520	2,520		Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS (HS)	7	Layanan Survei faktor risiko penyakit HIV	-	-	-	-	4,599	4,599		-	-	-	-	-	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan situasi khusus
		Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	7	Survei faktor risiko penyakit TB					19,093	19,092				-	-	-	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus





		Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	84	Penemuan aktif surveilans migrasi malaria	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
		Pengadaan alat dan bahan kekarantinaa n kesehatan di pintu masuk (HS)	6	a. Sarana dan Prasarana Pengawasan vektor	5,000	30,000	30,000	25,000	30,000	2,683	19,000	19,000	18,000	10,000	19,016	500	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaa n Kesehatan ;Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan;
				b. Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan													
				c. Pengadaan obatobatan untuk pelayanan kesehatan													
				d. Pengadaan Bahan /alat Medis dan non medis untuk pelayanan kesehatan													
				e. Pelayanan Keshetan Situasi khusus dan haji													





				f. Pengadaan bahrn/alat bahan non medis pendukung pemeriksaan alat angkut orang dan barang													
2		Layanan Pengendalia n Faktor Risiko di Pelabuhan Penyeberan gan	240	Layanan Pengendalian faktor risiko penya ki di pelabuhan penyebaran	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	13,20 0	Tim Kerja Pengawas an Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
		Layanan pengendalia n faktor risiko di bandara	72	a. Pelaksanaan Kekarantinaa n kesehatan di Bandara	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	Tim Kerja Pengawas an Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
	Persen tase faktor risiko penyakit masuk yang dikendalika n pada orang, alat angkut barang dan lingkungan	Layanan pengendalia n faktor risiko penyakit pada situasi khusus (HS)	56	Pelayanan kesehatan pada situasi khusus	25,00 0				35,00 0							27,08 0	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Orang, Kegawatd aruratan, dan Situasi khusus
		Layanan pengendalia n faktor risiko penyakit DBD (HS)	28	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD (HS)			8,428			8,428				8,428		8,428	Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n





		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	28	Pengendalian Diare			3,353		3,353			3,353			3,353		Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
		Layanan Pengendalian Faktor Risiko Malaria	18	Pengendalian Faktor Risiko penyakit Malaria			8,154			8,154				8,154		Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan	
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)	2	a. Pelayanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan					23,914	23,914						Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan situasi khusus	
		Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut (HS)		b. Penanganan Alat Angkut, orang Barang Pada Situasi Khusus	1,870	1,871	1,872	1,873	1,874	1,875	1,876	1,877	1,878	1,879	1,880	1,881	Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan situasi khusus
		Koordinasi	11	a. Konsultasi Pelaksanaan Program ke Pusat	-	-	-	-	67	5.120	-	-	-	-	5.120	-	Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan
				b. bimtek petugas induk ke wilker													





			c. koordinasi lintas sektor tentang program pengendalian vektor DBD di Wilayah Pelabuhan/B andara															Kesehatan ; Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehata n Alat Angkut dan Barang; Tim Kerja Pengawa san Faktor Risiko Kesehatan Lingkungana n
			Menghadiri Kegiatan Hari pengendalian Nyamuk															
			Menghadiri kegiatan rapat koordinasi integrasi dan interoperabilitas SKDR															
			Menghadiri kegiatan penyusunan Indikator Surveilans Kekarantinaan Kesehatan															
			Pertemuan Koordinasi Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar udara dan PLBDN															





4	Nilai kinerja anggaran	Layanan BMN	2	a. Penyusunan Laporan BMN									41,556			Kasubbag Adum
			2	b. Penyusunan RKBMN												
		Layanan Umum	3	a. Paket data dan Komunikasi	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,939	3,934	3,934	3,934	Kasubbag Adum
				b. Langganan Aplikasi Meeting Berbayar												
				c. Pengelolaan dan Pendukung penilaian Kantor berhias												
		Layanan Data dan Informasi	1	Penyusunan Profil			4,300									Kasubbag Adum
		Layanan Perkantoran	12	a. Gaji dan Tunjangan	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	511,279	Kasubbag Adum
				b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	293,611	Kasubbag Adum
		Layanan Pemantauan dan evaluasi	84	a. Penyusunan laporan tahunan satker	1,500											Kasubbag Adum





				b. Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program P2P		39,930										Kasubbag Adum
				c. Penyusunan Lakip dan Perjanjian Kinerja		26,620										Kasubbag Adum
				d. Evaluasi Sakip		29,140										Kasubbag Adum
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Penyusunan Arsip di Lingkungan Ditjen P2P									26,620			Kasubbag Adum
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	a. Penyusunan e renggar		26,620										Kasubbag Adum
				b. Penyusunan RKAKL						47,850			29,140			Kasubbag Adum
				c. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan revisi anggaran												Kasubbag Adum





6	Kinerja Implementasi WBK satker	Layanan Hukum	3	a. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan whistleblowing system		3,000	3,400	4,000	4,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,274		Kasubbag Adum
				b. Advokasi Hukum dan bantuan hukum													
				c. Pengelolaan unit pengendalian gratifikasi													
		Layanan Hubungan Masyarakat	1	Diseminasi/promosi informasi kegiatan						9,000							Kasubbag Adum
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	a. Penyusunan dan reviu dan analisis beban kerja, peta dan informasi jabatan					13,432								Kasubbag Adum
				b. Penyusunan/Monev SOP AP UPT							13,432						Kasubbag Adum





				c. Pembagunan zona integritas menuju satket WBK,penguatan dan pendampingan assesment penilaian satker WBK/WBBM			17,283				17,283					Kasubbag Adum
7	Persetase ASN yang ditingatkankapasasnya sebanak 20JPL	Layanan Manajemen SDM Internal	3	Diklat/seminar/kursu dukungan manajemen			17,680				17,680					Kasubbag Adum
		Pelatihan Kesehatan	50	a. On the Job Training Penguatan TGC Petugas BKK dalam Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Penyakit berpotensi KKM di Pintu Masuk Negari					111,490							Kasubbag Adum
				b. Pelatihan Fumigasi				18,280								
				c. Pelatihan ACLS						31,620						





				d. Palatihan BTCLS									29,21 1			
				e. Pelatihan Ahli K3										15,91 5		
				f. OJT Peningkatan Kapasitas Tenaga Entomolo Kesehatan											47,03 1	
				g. Workshop Teknik Sampling dan pengemasan Sampel								34,44 0				
				h. Pelatihan Surveilans Penyakit Potensi Wabah				56,76 0								
				i. Pelatihan GIS			33,55 0									
8	Persentase Realisasi Anggaran	Layanan Manajemen Keuangan	12	a. Penyusunan Laporan Keuangan	13,53 2			13,57 3	26,84 2							Kasubbag Adum
				b. Pengelolaan dan Pelaporan PNBP												



Sorong, Maret 2025

Adang Budijono, SKM., MKM.
NIP.197201291995031001



